

BAB VII

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A. UMUM

Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan suatu subsistem dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kuat.

Dengan akan diberlakukannya AFTA pada tahun 2003, serta perdagangan bebas Asia-Pasific dalam kerangka APEC pada tahun 2020, mengharuskan dunia pendidikan khususnya di Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta dapat mengantisipasi kompetisi pendidikan global di masa mendatang.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang pendidikan hingga SLTP, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Disadari bahwa meskipun upaya perbaikan pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun mutu pendidikan selama ini masih belum memenuhi harapan.

Dalam pengembangan pendidikan di Propinsi DKI Jakarta, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu (1) faktor internal yang menyangkut efektivitas proses belajar mengajar yang pada kenyataannya sangat tergantung pada sarana dan prasarana belajar, kualitas dan kuantitas pengajar, metode mengajar dan kurikulum, serta pengelolaan persekolahan, dan (2) faktor eksternal yaitu menyangkut peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu.

Pada saat ini dunia pendidikan di Propinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu (1) masih rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas guru dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha, (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi, serta (4) kelengkapan sarana prasarana pendidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan akhir-akhir ini telah menjadi fokus perhatian baik pemerintah daerah maupun masyarakat, karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan salah satu faktor bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Masalah kesehatan ini sangat menonjol terutama pada golongan masyarakat miskin. Pendapatan dan kesejahteraan yang rendah menyebabkan mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya pada pemenuhan kebutuhan makanan daripada kesehatan. Disamping itu, lingkungan perumahan yang tidak sehat, sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya perilaku serta pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan.

Sementara itu ketidakmampuan mengkonsumsi makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup, menyebabkan tingkat gizi pada masyarakat juga masih rendah, sehingga upaya untuk memenuhi mutu gizi masyarakat masih jauh dari harapan. Selanjutnya di bidang sarana dan prasarana kesehatan masih perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang terkait dengan Puskesmas, agar pelayanan kesehatan dapat menyebar secara merata pada seluruh lapisan masyarakat dengan mutu yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas tenaga medik.

Berbagai permasalahan tersebut seyogyanya menjadi fokus dalam melaksanakan program-program pembangunan yang terkait dengan bidang kesehatan. Strategi yang digunakan adalah desentralisasi, peningkatan peranserta

masyarakat termasuk sektor swasta, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan kesehatan, dengan prioritas perbaikan kesehatan pada masyarakat miskin.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan sesuai fungsinya oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah:

1. Pendidikan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga medik dan para medik, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi masyarakat, serta dapat memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

1.1. Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar

Pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar dimaksudkan untuk menjawab adanya program wajib belajar selama 9 tahun, yaitu sampai dengan

lulus SLTP dan sederajat yang meliputi pendidikan tingkat SD dan SLTP, dalam hal ini termasuk pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Program pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD/MI dan SLTP/MTs, dan lembaga pendidikan setingkat sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat, (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah kumuh, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan, (3) meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tingkat dasar dengan kualitas yang memadai, (4) meningkatkan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta (5) menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school/community based management*).

Sasaran yang akan dicapai oleh program pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar sampai dengan akhir tahun 2007 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/M) sekolah tingkat dasar, (2) meningkatnya daya tampung SLTP/MTs, (3) terlaksananya layanan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin dan anak terlantar, (4) meningkatnya proporsi guru yang berpendidikan minimal D-2 untuk guru SD/MI dan minimal D-3 untuk guru SLTP/MTs, (5) tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai, serta (6) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*).

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah tingkat dasar adalah: (1) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan sekolah) SD/MI dan SLTP/MTs di semua wilayah termasuk sarana dan prasarana olahraga, (2) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang

berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, (3) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin, kumuh, berpindah-pindah, anak jalanan, seperti SD dengan satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, (4) melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai, dan (5) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat meningkatkan kualitas dan citra pendidikan, (2) meningkatkan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, buku pelajaran pokok, buku bacaan dan alat pendidikan lainnya, (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar, (4) melakukan pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan, dan (5) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar adalah: (1) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana, (3) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat baik antar lembaga maupun personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, dan (4) memberdayakan personel dan lembaga secara profesional, antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional.

1.2. Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Program pengembangan pendidikan luar sekolah tingkat pendidikan dasar bertujuan untuk menyediakan pelayanan pada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta potensi pribadi. PLS ini juga bertujuan untuk dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan ketrampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Sasaran program ini adalah penduduk yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal yang meliputi: (1) tertampungnya warga untuk belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan (2) termanfaatkannya tempat/sanggar pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: (1) mempercepat penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional, khususnya bagi penduduk usia 7-18 tahun, (2) pengaktifan taman bacaan dan perpustakaan yang sudah ada, agar warga gemar membaca buku, (3) meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan, kualitas dan kuantitas warga masyarakat belajar Kejar Paket A dan B yang setara SD dan SLTP, (4) mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan, dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, serta (5) mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan.

1.3. Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan

Program pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah umum, termasuk pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Aliyah (MA), dan kejuruan ditujukan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung sekolah menengah umum (SMU)/MA dan sekolah menengah kejuruan (SMK) bagi

seluruh lapisan masyarakat, (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan masyarakat miskin, (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja, (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia, (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan sampai dengan akhir tahun 2007 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/M) SMU/MA/SMK, (2) meningkatnya daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, (3) meningkatnya proporsi guru yang berpendidikan minimal S-1, (4) tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SMU/MA/SMK yang lebih baik, dan (5) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*).

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah menengah umum dan kejuruan adalah: (1) membangun dan merehabilitasi sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga, (2) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat tidak mampu, kumuh, dan anak jalanan, (3) memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dan (4) memberikan subsidi untuk siswa sekolah yang tidak mampu, diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang kemampuan ekonominya lemah.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah: (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang tertentu yang ditinjau dan dievaluasi secara periodik, (2) meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender sesuai dengan kapasitas peserta didik, (3) mengembangkan lomba karya ilmiah dan sejenisnya yang disesuaikan dengan standar yang dipakai di dunia pendidikan nasional, (4) melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan, (5) mengembangkan program-program keterampilan pada SMU/SMK yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU/SMK yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja, (6) meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga, perpustakaan, komputer dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap, (7) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, (8) melakukan pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan, dan (9) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sehingga peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan adalah: (1) membentuk dan meningkatkan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah, (2) mengembangkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,

(3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah, (4) mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, (5) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, (6) memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional, (7) meninjau kembali semua peraturan di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan, dan (8) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

1.4. Program Pengendalian dan Peningkatan Informasi Perguruan Tinggi

Kerjasama antar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Propinsi DKI Jakarta, masih terbatas pada beberapa kegiatan, seperti kegiatan penelitian/pengkajian, olahraga dan seni, namun belum tampak secara jelas kerjasama dalam bidang lain, perencanaan strategis berdasarkan kebutuhan masyarakat, peningkatan informasi dan sejenisnya. Sehubungan dengan hal tersebut program pengendalian dan peningkatan informasi perguruan tinggi bertujuan untuk menggalang kerjasama dan memberikan informasi penelitian antar perguruan tinggi yang ada di wilayah Propinsi Propinsi DKI Jakarta, yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta, serta perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi, yang pada gilirannya akan dapat merugikan seluruh potensi yang ada.

Sasaran program ini adalah terciptanya kerjasama antar perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Propinsi DKI Jakarta dalam bidang penelitian, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan Propinsi DKI Jakarta ataupun daerah-daerah lain.

Kegiatan utama yang akan dilakukan pada program ini meliputi: (1) melakukan koordinasi penelitian mengingat makin bertambahnya baik jenis

maupun kualitas penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, agar tidak terjadi tumpang tindih penelitian antar perguruan tinggi, (2) mengusahakan agar jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dunia usaha dan pemerintah Propinsi DKI Jakarta, (3) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses perkuliahan yang bermutu, (4) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan daerah, (5) melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga di dalam ataupun di luar negeri, untuk mendapatkan informasi kebutuhan lembaga dan mutu pendidikan tinggi, (6) mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi dan pendataan untuk semua jalur, jenis, dan jenjang, serta kondisi daerah, dan (7) mengembangkan dan memantapkan pusat-pusat unggulan di lembaga riset masing-masing perguruan tinggi.

1.5. Program Pengembangan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan yang sudah ada khususnya bagi mereka yang belum sempat memperoleh pendidikan formal atau sudah tidak lagi mengikuti pendidikan baik tingkat dasar ataupun menengah. Disamping itu program ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam berbagai bidang, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menambah keterampilan berusaha secara profesional, sehingga warga mampu untuk mewujudkan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Sasaran program pembinaan dan pengembangan perpustakaan adalah meningkatnya minat baca warga masyarakat yang berkehendak untuk memacu diri di dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta semakin profesionalnya para pengelola perpustakaan agar mampu menyediakan bahan bacaan yang bermanfaat dan bermutu, disamping dapat menarik minat baca anggota masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) menambah jumlah dan jenis bahan bacaan/pustaka, (2) melakukan reformasi perpustakaan dari segi tampilan fisik perpustakaan agar menambah minat baca masyarakat, (3) meningkatkan

keterampilan dan profesionalisme pustakawan melalui jabatan fungsional pustakawan, (4) meningkatkan pengetahuan pustakawan melalui pendidikan formal/non formal, dan (5) mengembangkan jangkauan pelayanan perpustakaan baik dengan penambahan perpustakaan ataupun dengan perpustakaan keliling.

2. Kesehatan Masyarakat

2.1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatkan upaya preventif dan promotif pada masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya persentase jumlah pasien yang dirujuk oleh lembaga pelayanan kesehatan dasar, (2) meningkatnya jumlah cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal, (3) meningkatnya kualitas petugas pelayanan kesehatan, (4) berkurangnya prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, (5) berkurangnya prevalensi kurang vitamin, (6) meningkatnya cakupan imunisasi, (7) meningkatnya jumlah kalori yang dikonsumsi, (8) berkurangnya keluhan pasien terhadap pelayanan kesehatan

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program adalah: (1) meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan pada masyarakat, (2) meningkatkan kegiatan imunisasi gratis bagi masyarakat, (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, (3) meningkatkan kualitas, profesionalisme dan dedikasi petugas pelayan kesehatan, (4) mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi akurasi, dan (5) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2.2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui dukungan sarana dan prasarana dan SDM bidang kesehatan yang lebih baik. Pelayanan

ini hendaknya tanpa melihat dari golongan mana masyarakat yang dilayani sehingga diharapkan tidak terjadi peristiwa yang fatal bahkan kematian akibat lambatnya pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga sikap dan perilaku masyarakat harus bersifat proaktif dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat. Tujuan program ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh masyarakat luas tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.

Sasaran umum program ini adalah meningkatnya kesehatan masyarakat melalui tersedianya pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas) yang didukung oleh peranserta masyarakat dan sistem pembiayaan praupaya (dana jaminan kesehatan). Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan sesuai masalah setempat. Sedangkan sasaran khususnya adalah meningkatnya sarana kesehatan yang melaksanakan *quality assurance* (QA), meningkatnya persentase jumlah dan jenis pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta, meningkatnya proporsi tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, meningkatnya jumlah dan persentase keluarga yang menghuni rumah sehat, serta meningkatnya frekuensi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program adalah: (1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, (2) mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi akurasi, (3) melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan kesehatan masyarakat, (4) mengembangkan kebijakan manajemen yang mendukung kegiatan pelayanan yang profesional, (5) mengembangkan dan menyebarkan sistem informasi kesehatan pada

masyarakat, dan (6) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, melalui "kartu sehat".

2.3. Program Penanganan Gawat Darurat

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan kecepatan dan kesiapan dalam memberikan penanganan keadaan gawat darurat, dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada serta SDM bidang kesehatan, tanpa melihat dari golongan mana masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya persentase jumlah pasien gawat darurat yang terlayani dan tertangani, terutama masyarakat tidak mampu, (2) meningkatnya kualitas petugas pelayanan unit gawat darurat, (3) semakin cepatnya waktu pelayanan dan penanganan pasien gawat darurat, (4) berkurangnya jumlah kematian pasien di unit gawat darurat, (5) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien gawat darurat, (6) berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kesehatan di unit gawat darurat.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program adalah: (1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di unit gawat darurat, Puskesmas, Pra RS dan RS, (2) meningkatkan kualitas, profesionalisme dan dedikasi petugas pelayanan kesehatan gawat darurat, (3) mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi akurasi, dan (4) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2.4. Program Perbaikan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Tujuan umum program ini adalah menunjang keberhasilan dari tiga program Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta yaitu program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Gawat Darurat, dimana ketiga program tersebut adalah program yang langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Propinsi DKI Jakarta.

Sasaran yang akan dicapai adalah (1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia (tenaga kesehatan) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, (2) meningkatnya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, (3) meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, (4) meningkatnya perilaku masyarakat Propinsi DKI Jakarta kearah yang kondusif bagi kesehatan, (5) meningkatnya peranserta masyarakat di bidang kesehatan, (6) terselenggaranya sistem informasi kesehatan di setiap unit dibawah Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, (7) terselenggaranya sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan Propinsi DKI Jakarta dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi/kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program adalah: (1) mengembangkan sumber daya manusia, (2) meningkatkan mutu pelayanan, (3) mengadakan sarana dan prasarana kesehatan, (4) menyelenggarakan promosi kesehatan, (5) menyelenggarakan kegiatan kemitraan, (6) mengembangkan sistem informasi kesehatan, dan (7) menyempurnakan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan.